

Multikulturalisme di Eropa

OKKE KS ZAIMAR

Ketua Program Studi Kajian Wilayah Eropa PPs Universitas Indonesia

JOESANA TIAHJANI

Pengajar pada Program Studi Prancis FIB Universitas Indonesia

Abstract

The recognition of the cultural pluralism by a country and its society is a challenge regarding the existence of its social justice. Multiculturalism is considered as a recent 'innovation' in a democratic society, leading to the social justice despite its various forms and different implementations in each country. This article depicts the multicultural growths, development and issues in some European countries and the European Community. The Netherlands has introduced combined recognition regarding cultural pluralism and its national integration concept on the basis of the membership of a community. The United Kingdom prioritizing individuals rather than institutional organizations is still facing racism issues. France tends to be in the crossroad with the existence of the ideas against the myths presenting social identities. The European Community has been conflicting the identity of Europe.

Keywords: multiculturalism, pluralism, imigrant, minority, social identities

Masalah multikulturalisme sebenarnya relatif belum berapa lama dibicarakan, namun hal ini dengan cepat berkembang sebagai salah satu lahan perdebatan yang menarik untuk dipelajari. Dikatakan menarik, karena membicarakan keragaman etnis dan budaya, serta

penerimaan kaum imigran di suatu negara, dalam hal ini yang akan dibicarakan adalah negara-negara di Eropa. Pada awalnya, yang dikenal hanyalah istilah "pluralisme" yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya, baru kemudian (sekitar paruh ke dua abad ke-20), mulai

beredar istilah multikulturalisme. Istilah ini mempunyai tiga unsur, yaitu: budaya, keragaman (budaya), dan cara khusus untuk bereaksi atas keragaman budaya tersebut. Pada umumnya, masyarakat modern mencakup berbagai kelompok manusia yang memiliki status budaya dan politik yang sama. Selanjutnya, demi dinamika kesetaraan masa kini, pengakuan akan adanya pluralisme kultural menjadi suatu taruhan dari keadilan sosial.

Doytcheva mengemukakan tiga hal yang tercakup dalam pengertian multikulturalisme. Menurut pengertian itu, (1) multikulturalisme merupakan suatu ideal atau suatu program politik, dan bukan merupakan karakteristik suatu masyarakat. Masyarakat manusia sejak dulu selalu jamak, secara kultural beragam, namun jawaban politis atas keragaman itu berbeda-beda, bergantung dari jamannya; (2) multikulturalisme betul-betul merupakan penemuan masa kini, paling tidak pada awalnya, pada masyarakat demokratis yang telah menyaksikan transformasi pertanyaan tentang perbedaan kultural dalam suatu pertarungan keadilan masyarakat; (3) sebagai program politik, multikulturalisme membawa suatu perubahan institusional dan secara umum, membawakan peran aktif kekuasaan publik. Dalam sudut

pandang ini multikulturalisme perlu dibedakan dari jawaban lain untuk masalah keragaman, seperti masalah metis, kosmopolitisme atau interkultural, yang membawakan solusi bersifat individual, baik yang bersifat biologis, estetik, maupun kultural (Doytcheva, Milena. 2005, hal. 16-17).

Multikulturalisme berposisi dengan gagasan monokulturalisme yang sejak awal abad XIX, merupakan norma dalam paradigma negara bangsa. Monokulturalisme secara tak langsung mengacu pada kesatuan budaya yang normatif, "monokultural" bisa merupakan suatu istilah yang deskriptif untuk homogenitas yang telah ada.

Kini sampailah kita pada masalah yang sangat erat kaitannya dengan multikulturalisme, yaitu pluralisme. Dapat dikatakan, konsep pluralisme terlalu sulit, kompleks, atau samar. Atau sebaliknya, istilah ini memberikan pengertian yang terlalu remeh, jadi terlalu mudah atau kosong makna. Pada masa kini, kata ini telah menjadi mode, karena itu juga telah menjadi berlebihan dan rendah. Namun hal itu tidak menghalangi kita untuk menelitinya. Perbedaannya adalah: toleransi menghargai nilai-nilai orang lain, sedangkan pluralisme menegaskan nilainya sendiri (Srtori, Giovanni, 2003: 16-17). Dikatakan pula bahwa memahami pluralisme berarti juga memahami toleransi, konsensus,

ketidaksetujuan, dan konflik. Toleransi tidak mencakup pengertian tak peduli. Apabila kita tak peduli, maka kita tidak punya kaitan dengan hal yang dibicarakan. Seseorang yang menganggap dirinya toleran pada prinsip dan kepercayaan yang dianggapnya benar, dan dia menyetujui orang lain melaksanakan kepercayaan yang dianggapnya palsu. Ini bukanlah toleransi, karena toleransi ada batasnya. Toleransi selalu dalam keadaan tarik menarik dan tidak pernah total (Sartori, Giovanni, 2003: 35-36).

Sebagaimana dikemukakan di atas, multikulturalisme banyak macamnya. Di sini akan dikemukakan keadaannya di beberapa negara Eropa dan di Uni Eropa, sebagai suatu fenomena baru dalam ketatanegaraan dunia. Mari kita lihat satu per satu tentang keadaan di negara-negara Eropa dan di Uni Eropa sendiri dalam hubungannya tentang multikulturalisme.

Negeri Belanda

Sejak paruh ke dua abad ke-20, Negeri Kincir Angin ini banyak didatangi imigran dari berbagai negara Eropa. Memang negara ini tidak monolingual, namun setiap warga Belanda dapat berbahasa Belanda dengan baik, sehingga orang Belanda merasa memiliki budaya yang

sama. Mereka merasa memiliki identitas yang sama, mengenal mitos-mitos dan pahlawan yang sama. Baru pada tahun 1960-an migrasi tenaga kerja mulai ada, dan hal itu berkembang terus hingga pada tahun 1970 mencapai puncaknya dengan kedatangan para pekerja, terutama dari Maroko dan Turki.

Sejak saat itu, "multikulturalisme" menjadi konsensus ideologi di antara "kelas politik" yang resmi dari pemerintahan. Prinsip mereka tampak dalam kalimat "*Integratie met behoud van eigen taal en cultuur.*" Hal ini berarti integrasi sosial dilaksanakan, namun para pendatang masih boleh tetap menggunakan bahasa dan memegang budaya mereka sendiri. Di negeri ini dilakukan kombinasi antara pengakuan terhadap pluralisme budaya dan konsep tentang integrasi nasional yang berlandaskan keanggotaan sebuah komunitas. Model ini merupakan karakteristik integrasi nasional Belanda. Sebenarnya, naiknya multikulturalisme di Belanda merupakan kelanjutan dari tradisi Belanda dalam hal pluralisme agama dan budaya. Setiap komunitas agama berhak untuk mengembangkan institusinya sendiri (misalnya sekolah, organisasi perburuhan). Pada tahun 1980, dilakukan politik "minoritas etnis" yang tujuan resminya adalah mengizinkan kaum imigran untuk

memelihara identitas kultural dan tradisi mereka. Hal ini ditopang oleh berbagai tindakan, antara lain pengajaran bahasa imigran di sekolah pemerintah, dibangunnya sekolah-sekolah swasta yang disubsidi oleh pemerintah, dukungan pada asosiasi etnis, dan lain-lain. Tindakan-tindakan ini sejalan dengan usaha-usaha untuk menyetarakan orang asing dan warga nasional, dan merupakan karakteristik tahun 1970-1980 (Doytcheva, Milena, 2005: 58-59). Ada kalanya kaum imigran diperlakukan sebagai anggota blok kultural yang monolitik, dengan landasan kebangsaan – hanya agama mereka-lah yang menjadi isu pada sekitar tahun 1990-an. Komunitas ini berkomunikasi dengan pemerintah Belanda dalam bahasa yang dianggap sebagai bahasa mereka – bahasa Arab bagi orang Moroko, meskipun banyak di antara mereka yang tidak memahami bahasa itu. Oposisi terhadap konsensus ini secara politis bersifat marjinal.

Konsensus kaum elite terhadap multikulturalisme mulai diperdebatkan, dan bersamaan dengan itu, kebencian terhadap imigrasi meluas, dan definisi etnik tentang bangsa (*nation*) Belanda juga dipermasalahkan. Nasionalisme Belanda dan dukungan terhadap identitas nasional yang tradisional, tak pernah hilang,

hanya saja tidak tampak. Ketika faktor ini kembali diperdebatkan pada akhir tahun 1990, hal ini turut membantu runtuhnya konsensus tersebut. Kini, negeri Belanda menarik perhatian dunia internasional, karena negeri ini berputar haluan dari politik multikulturalis yang dianut sebelumnya, menjadi politik asimilasi budaya. Kebijakan yang dianutnya ini terkenal sebagai yang paling keras di Eropa. Pada praktiknya, proporsi imigrasi ditentukan oleh permintaan akan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian, dan kemudian oleh imigrasi anggota keluarga para pekerja. Jumlah imigran yang bukan orang Eropa berjumlah kurang lebih sebanyak 3 juta orang. Jumlah imigran dan proporsi kelahiran pada komunitas imigran telah mengubah negeri Belanda sejak tahun 1950-an. Meskipun mayoritas masih etnis Belanda, pada tahun 2006, seperlima penduduk bukan lagi orang Belanda, dan separuh imigran itu bukan orang Eropa. Imigrasi telah mengubah wajah kota-kota di negeri Belanda, terutama di Amsterdam, 55% anak muda bukan orang Eropa (melainkan terutama orang Turki dan Maroko). Bagi orang-orang yang menentang multikulturalisme dan imigrasi, hal ini tak dapat diterima. Bangsa Belanda seakan menghadapi masalah yang sangat mendasar: hilangnya identitas

Belanda. Para penentang ini mempersoalkan nasionalisme dan dukungan terhadap identitas nasional. Pada tahun 1990 perdebatan meruncing dan berakhir dengan runtuhnya konsensus tersebut. Kini akan kita lihat argumentasi kedua belah pihak yang berdebat.

*Perdebatan tentang Adanya
Konsensus Multikulturalisme:
Pandangan Kaum Intelektual*

Pertama-tama tentu akan dikemukakan pendapat mereka yang menganut multikulturalisme: Hal ini sudah menjadi konsensus pemerintah, jadi sebenarnya kita perlu mempercayai tekad baik pemerintah. Yang perlu diingat adalah bahwa pemerintah menerima para pekerja itu demi kemajuan ekonomi mereka sendiri tidak terhalang karena kekurangan tenaga kerja. Kemudian, pemerintah melihat bahwa semua kebudayaan perlu mendapat respek dan kebebasan untuk mengatur dirinya. Kehidupan yang baik dapat dilaksanakan dengan cara yang berbeda, tak ada satu komunitas budaya pun yang mempunyai monopoli akan hal itu. Alasan lain dari pemerintah Belanda adalah adanya tradisi pluralisme kultural di negeri Belanda, sehingga tindakan pemerintah ketika itu hanyalah melanjutkan tradisi. Selain itu rupanya pada saat itu pemerintah Belanda menganut

kebebasan individual yang cukup tinggi, sehingga membiarkan pada pendatang itu hidup dengan caranya sendiri (Wiarda, Howard J., 2001).

Kemudian, marilah kita lihat argumentasi pihak yang menentang multikulturalisme. Paul Cliteur, seorang ahli filsafat hukum, menyerang semua yang dianggap sebagai kebenaran politis dalam issue tentang multikulturalisme. Menurut Cliteur, budaya Barat yang mengemukakan "rule of law" dan hak-hak azasi manusia, lebih tinggi nilainya dari pada budaya yang non-Barat, karena semua itu adalah produk dari "Enlightenment" (masa pencerahan). Ia juga menganggap multikulturalisme sebagai ideologi yang tak dapat diterima. Ideologi tentang relativitas budaya ini akan membawa masyarakat Belanda untuk menerima berbagai praktik barbar yang dibawa kaum imigran, seperti pembunuhan terhadap anak-anak (penyiksaan, perbudakan, penekanan terhadap kaum wanita, homophobia, rasisme, anti-Semitisme, gang, sunat wanita, diskriminasi oleh para imigran sendiri, suti, dan hukuman mati).

Pada tahun 2000, Paul Scheffer, anggota Partai Buruh, dan seorang profesor *urban studies*, menerbitkan "The Multicultural Urban Drama" yang berisi kritik baik atas multikulturalisme maupun imigrasi. Ia adalah

suporter dari *nation state*, dan titik tolaknya adalah bahwa homogenitas dan integrasi perlu untuk suatu masyarakat: kehadiran kaum imigran melecehkan hal ini.

Menurut pendapatnya, memang masyarakat mempunyai "kemampuan menyerap" budaya lain, tapi keadaan di Belanda ini sudah berlebihan, terutama karena kedatangan sejumlah besar imigran dari berbagai latar belakang. Pemerintah Belanda tidak mengharuskan mereka mempelajari bahasa, budaya, dan sejarah Belanda, sehingga mereka tetap tidak dapat menyesuaikan diri dengan anak negeri, padahal seharusnya hal itu menjadi prioritas dalam bidang pendidikan. Selain itu, multikultural dan imigrasi menimbulkan berbagai masalah adaptasi, seperti *drop out* sekolah, dan angka kejahatan yang tinggi.

Scheffer menyetujui pendapat sosiolog JAA van Doorn, yang menyatakan bahwa kehadiran kaum imigran di negeri Belanda seperti "memutar kembali jarum jam" sejauh 100 atau 150 tahun. Proporsi imigrasi yang begitu tinggi, dan tiadanya "integrasi" merupakan ancaman bagi masyarakat, dan harus dihentikan. Esai ini menimbulkan akibat yang besar, dan mengarahkan pada apa yang kemudian dikenal sebagai "debat integrasi", karena di dalam

esai ini tidak hanya terdapat masalah multikulturalisme, namun juga tentang imigrasi, Islam, identitas nasional dan kesatuan nasional.

Pada tahun 2002, seorang mahasiswa hukum yang juga seorang pengungsi dari Iran, Afshin Ellian, membela negara hukum monokultural di negeri Belanda. Menurut pendapatnya, demokrasi liberal tidak mungkin multikultural, karena multikulturalisme merupakan ideologi dan suatu negara demokrasi tidak mempunyai ideologi yang resmi. Selain itu, menurut Ellian, negara demokrasi haruslah monolingual (berbahasa satu). Bahasa Belanda adalah bahasa konstitusi, karena itu harus merupakan satu-satunya bahasa publik, semua bahasa lain harus terbatas pada wilayah pribadi. (Wiarda, Howard J. 2001)

Reaksi Golongan Politik

Penolakan kaum intelektual terhadap multikulturalisme diikuti oleh transformasi politik, yang membawa pada ditiadakannya multikulturalisme secara resmi. Dalam media Belanda sering digambarkan sebagai pemberontakan rakyat melawan kaum elite.

Katalisatornya Pim Fortuyn, seorang kritikus multikulturalisme, terutama tentang apa yang disebutnya sebagai "Pengislaman negeri Belanda".

Ia berhasil terutama karena kharismanya. Tidak seperti para kritikus intelektual yang menulis untuk kaum elite saja, Fortuyn memobilisasi beribu-ribu pemilih yang kecewa dan kadang-kadang para penderita xenophobia. Ia hampir saja menjadi perdana menteri, namun ia mati tertembak pada Mei 2002. Para pengikutnya menganggapnya sebagai martir nasional melawan multikulturalisme, meskipun sebenarnya ia ditembak oleh seorang yang memperjuangkan hak binatang.

Setelah kematian Fortuyn, penolakan terhadap multikulturalisme dan imigrasi tidak tabu lagi. Lebih jauh lagi, bagi sebahagian orang, rasisme yang terbuka juga tidak lagi merupakan tabu: sering terjadi reaksi negatif terhadap imigran. Kabinet yang baru di bawah pimpinan perdana menteri Jan-Peter Balkende, mencanangkan politik asimilasi garis keras, diperkuat oleh denda dan deportasi, juga diikuti oleh kontrol yang jauh lebih keras terhadap imigran dan asilum. Pada tahun 2006 ada manifesto "satu negeri, satu masyarakat". Para pendukung multikulturalisme berubah haluan. Mereka menghendaki masyarakat yang homogen. (Waiarda, Howard J., 2001)

Demikian gambaran amat singkat "perjalanan" multikulturalisme di negeri Belanda. Pemerintah Belanda

melaksanakan pemikiran para intelektual dan aktivis politik dan semua berakhir dengan perubahan tindakan pemerintah.

Inggris

Negeri ini secara terus menerus menerima imigrasi dalam proporsi yang tinggi, bahkan merupakan salah satu yang tertinggi di Uni Eropa. Sebagian besar imigran pada dekade terakhir ini, datang dari India atau Karibia— atau dapat dikatakan dari bekas jajahannya. Belakangan ini, kaum imigran datang dari Eropa Timur, terutama dari Polandia. Inggris mengembangkan strategi yang berbeda dalam mengurus keragaman etnis ini. Konsep Inggris tentang integrasi memberikan prioritas pada individu dan tidak pada organisasi institusional komunitas. Selain itu, tugas integrasi ini bukan dibebankan pada negara melainkan pada masyarakat sipil dan pada pasar kerja.

Kerajaan Inggris tidak pernah menghadapi asimilasi rakyat bekas jajahannya, yang melanjutkan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum mereka sendiri. Pada umumnya, politik multikultural di Inggris dikatakan mulai pada tahun 1968 ketika pemimpin buruh Roy Jenkins, menyampaikan pidato yang menge-

mukakan pandangan tentang integrasi bukan dalam bentuk fusi, tempat imigran menjadi orang Inggris, tetapi dalam bentuk kesetaraan kesempatan dengan keragaman budaya dan dalam suasana toleransi (Doytcheva, Milena, 2005:59).

Di Inggris, para pendukung pemerintahan partai Buruh, menganggap bahwa menolong golongan minoritas untuk memelihara budaya mereka, merupakan bantuan untuk menjaga hak mereka, sementara itu juga membantu partisipasi mereka sebagai warga negara – ini berarti melakukan integrasi tanpa asimilasi. Para kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini gagal dalam segala hal: kondisi sosial dan rasisme merupakan penghalang bagi integrasi kaum minoritas, juga multikulturalisme tidak berfungsi dengan baik.

Inggris masih ingin menjadi “pelindung” bekas jajahannya. Selain itu, memang Inggris membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan ekonominya yang sedang naik daun. Tenaga kerja ini berdatangan antara lain dari India dan Karibia, sedangkan akhir-akhir ini orang-orang dari Eropa Timur (terutama Polandia) banyak datang ke Inggris. Sementara itu keadaan di bekas jajahan menopang keinginan Inggris ini, karena memang keadaan di negri-negri itu belum maju, banyak tenaga kerja yang

menganggur. Namun masih banyak penghalang keadaan ini, misalnya saja rasisme masih belum padam, dan tenaga kerja bekas jajahan yang tak terdidik memberikan andil bagi kegagalan.

Kemudian terjadilah perdebatan antara pihak yang menunjang multikulturalisme dan yang menolaknya, masing-masing mengemukakan argumentasinya. Pihak pemerintah, yang mendukung multikulturalisme mengemukakan bahwa multikulturalisme berarti mengakui keberadaan budaya pendatang. Dengan demikian, pemerintah menolong golongan minoritas untuk memelihara budaya mereka, pengakuan ini juga merupakan bantuan untuk menjaga hak mereka, sementara itu juga membantu partisipasi mereka sebagai warga negara – ini berarti melakukan integrasi tanpa asimilasi.

Pada 7 Juli 2005 terjadi pemboman yang menyebabkan 50 orang meninggal. Setelah itu pihak oposisi (kaum konservatif) meminta Sekretaris Negara untuk menghapuskan kebijakan yang dianggapnya telah ketinggalan jaman, yaitu tentang multikulturalisme.

Pada Mei 2004, editor *Prospect Magazine*, David Goodhart, menyelenggarakan perdebatan tentang multikulturalisme dengan permasalahan: Apakah suatu negara yang

makmur dan suatu "masyarakat yang baik" dapat dipertahankan apabila warganya menjadi sangat berbeda-beda.

Kritik terbuka atas multikulturalisme tersebut, memberikan reputasi dan kehormatan bagi Prospect – yang sejak itu secara tegas menjadi bagian dari aliran orang banyak. Pada 7 Juli 2005 terjadi pemboman yang menyebabkan 50 orang meninggal. Sejak peristiwa itu, arah perdebatan pun berubah. Banyak kaum multikulturalis berubah pendapat. Setelah itu pihak oposisi (kaum konservatif) meminta Sekretaris Negara untuk menghapuskan kebijakan yang dianggapnya telah ketinggalan jaman, yaitu tentang multikulturalisme.

Pada Agustus 2006, sekretaris pemerintahan komunitas dan lokal, Ruth Kelly memberikan pidato yang dianggap sebagai signal akhir dari multikulturalisme sebagai kebijakan resmi. Juga pada November 2006, Perdana Menteri Tony Blair menyatakan bahwa Inggris mempunyai "nilai-nilai penting" dan hal ini merupakan kewajiban untuk diikuti. Ia tidak menolak multikulturalisme itu sendiri, namun ditambakkannya bahwa warisan Inggris sangat penting. Berikut ini cuplikannya:

"When it comes to our essential values - belief in democracy, the rule of law, tolerance, equal treatment for all, respect

for this country and its shared heritage - then that is where we come together, it is what we hold in common."

Sebenarnya, apa yang terjadi di Inggris tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Belanda. Hanya saja, alasan untuk meninggalkan multikulturalisme agak berbeda. Di negeri Belanda, "pertarungan" kedua pihak (pembela dan penentang) lebih seru, lebih banyak para penentang yang mengemukakan alasannya dengan jelas. Penghapusan multikulturalisme ini diikuti oleh kontrol yang ketat terhadap kaum minoritas, sehingga berubahnya sikap pemerintah dan kaum intelektual tampak lebih keras. Sementara di Inggris semua berjalan lebih halus. Perlu diingat bahwa terjadinya serangkaian pemboman di Eropa, khususnya di Inggris, mempercepat penyelesaian masalah.

Prancis

Seperti halnya Inggris, Prancis telah lama menerima para pendatang, bahkan sejak satu abad yang lalu. Berbagai alasan kedatangan para imigran, mulai dari mencari pekerjaan, mencari keselamatan dari kejaran politik, dan bagi para pendatang dari bekas jajahan, hal ini merupakan usaha meninggikan tingkat hidup. Selain itu, letak geografis negeri ini yang merupakan jalan persimpangan, menambah banyak jumlah imigran yang ingin

menetap di Prancis. Kini, statistik menunjukkan bahwa ada 3,6 juta orang imigran hidup di Prancis. Uraianya: 1,5 juta orang berasal dari negara-negara Eropa yang lain, 1,4 juta dari Afrika Utara (Magribi), 425.000 dari Asia Tenggara, dan 240.000 dari sub-Sahara Afrika— padahal jumlah penduduk Prancis secara keseluruhan ada 59 juta orang. Yang benar-benar imigran hanya 70 % (lahir di luar Prancis), sedangkan 20 % merupakan anak-anak yang lahir di Prancis. Selain itu, ada 1,3 juta masuk sebagai warga negara Prancis (Wiarda, Howard J., 2001: 107).

Sebenarnya, lebih dari seabad yang lalu, telah timbul berbagai pertanyaan tentang "nation", yaitu pertanyaan tentang bangsa Prancis: Apakah yang menjadikan orang Prancis menjadi seorang bangsa Prancis? Apakah sebenarnya yang merekatkan orang Flamand di utara, orang yang berbahasa Breton di semenanjung Bretagne dengan orang yang berbahasa Occitan (suatu bahasa daerah yang kuno) atau dengan orang Korsika, tempat asal Napoleon? Semua orang ini sama-sama memiliki satu bendera, lagu nasional, institusi politik, padahal keju, anggur, lagu-lagu, dan budaya mereka berbeda pada setiap daerah (Wiarda, Howard J., 2001: 105).

Jadi, hal ini tak banyak membantu

untuk menjelaskan, apa yang termasuk bangsa Prancis, melihat kenyataan percampuran ras telah menjadi begitu penting dalam pembentukan masyarakat suatu negeri modern. Ironisnya, pada suatu negeri yang menempatkan gagasan tentang identitas nasional itu begitu penting, telah terjadi kasus-kasus yang kontroversial. Sejak kecil, orang Prancis telah diajar bahwa pengertian "*la patrie*" (tanah nenek moyang) sangat penting. Namun hal ini menjadi tidak jelas bagi orang yang berasal dari negeri tempat imigrasi.

Selanjutnya, ahli filsafat Ernest Renan menyatakan bahwa identitas nasional bersifat afektif. Hal itu tergantung dari kebanggaan individual terhadap kelompoknya. Untuk menjadi orang Prancis, seseorang harus ingin menjadi bangsa Prancis (dan mungkin membelanya, bila diperlukan). Pada awal abad ke XX, dorongan utama kebijakan publik terhadap kaum imigran adalah apa yang disebut asimilasi. Strategi ini dilandasi kepercayaan bahwa budaya Prancis yang dominan lebih tinggi dari yang lain, dan budaya para imigran harus berasimilasi dengan budaya yang superior itu (Wiarda, Howard J., 2001: 106).

Meski demikian, setelah Perang Dunia II, tradisi yang menekankan pada asimilasi itu mulai ditinggalkan.

Alasan untuk melakukan hal ini ada dua. Pertama, di awal tahun 1960-an, para imigran yang datang bukan lagi dari Eropa (seperti dari Italia, Spanyol, atau Portugis), melainkan dari daerah-daerah bekas jajahan Prancis, dari sub-Sahara dan Afrika Utara. Banyak di antara mereka yang beragama Islam dan berkulit hitam. Maka "*cultural shock*" pun susah dihindari. Faktor kedua yang juga telah membuka perdebatan tentang asimilasi ini adalah serangan terhadap mitos-mitos Prancis yang menampilkan identitas nasional. Gerakan kedaerahan meminta agar bahasa dan budaya mereka pun diakui, dengan alasan bahwa pembentukan tokoh nasional itu dilakukan melalui destruksi terhadap budaya mereka.

Sementara itu para imigran hidup dalam kemiskinan dan keadaan sosial yang tidak stabil. Faktor-faktor ini mendorong beberapa kelompok imigran untuk mengajukan wacana lain, yaitu tentang integritas. Konsep ini menolak gagasan bahwa semua imigran akan berasimilasi dalam masyarakat Prancis, dengan meninggalkan budaya mereka dan mengambil cara hidup orang Prancis. Sebaliknya, konsep ini mengajukan gagasan bahwa budaya Prancis sendiri bisa dibentuk dan diubah dengan kehadiran begitu banyak kelompok yang berbeda-beda di tanah Prancis, dan

tokoh nasional Prancis mungkin dapat dijadikan jamak. Bagi para pembela negara Prancis, perubahan budaya dan identitas Prancis merupakan suatu kutukan. Mengapa orang Prancis ingin menjadi sesuatu yang lain? Itulah sebabnya maka sekarang kita lihat Prancis berada dalam suatu keadaan yang dapat dibandingkan dengan jalan yang mengandung banyak simpangan (*crossroads*) (Wiarda, Howard J., 2001:106-107).

Pada tahun 1998, Prancis melihat dirinya sebagai negeri yang mengandung begitu banyak ragam sosial dan etnis. Mungkin tidak bijaksana untuk memperdebatkan masyarakat mana yang lebih masyarakat yang pluralis. Mungkin, disiplin republikan dulu yang menanamkan gagasan satu bangsa yang tak dapat dipecah-pecah, sebagai modalitas yang dominan dalam mengorganisir kekuatan demokratis pada masyarakat Prancis, telah melemah. Kekuatan tersebut makin lama makin menyetujui pluralitas dan kekuatan budaya pada Prancis modern. Salah satu petunjuknya adalah kesediaan beberapa ahli masak untuk membuat masakan hasil fusi, penyatuan gaya dari budaya lain dengan *french cuisine*, suatu hal yang tak mungkin terpikirkan beberapa tahun yang lalu, namun sekarang telah menjadi mode. Meskipun demikian, jalan ke arah masyarakat yang pluralis

tidak berlapis emas. Banyak pertentangan dan perdebatan tentang hal ini. Dapat kita saksikan bahwa tentangan dari bawah hanya akan bersifat sementara, dan hal itu segera diikuti oleh kepuasan dengan adanya pelaksanaan, ketika pemerintah menyetujui gerakan pluralisme kultural. Dalam hal ini, kita lihat *crossroad* itu sebagai titik tolak dalam perkembangan suatu masyarakat yang lebih demokratis. Dengan hal ini, dimaksudkan bahwa institusi politik Prancis menjadi lebih terbuka untuk menerima perhatian masyarakat dan lebih responsif terhadap tuntutan mereka.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sejak jaman dahulu, sejak abad XVIII, memang Prancis merupakan negara yang banyak didatangi orang asing, dan mereka seringkali menetap. Mereka terutama terdiri dari orang Italia, Spanyol dan Portugis. Lebih-lebih setelah PD II, ketika Prancis mulai berhasil memajukan kembali ekonominya, dibutuhkan banyak tenaga pekerja. Ketika itu, banyak tenaga kerja yang datang dari negeri bekas jajahannya.

Memang Prancis ingin menjadi sebagai negeri yang terbuka. Reputasi Prancis sebagai negeri kebebasan sejak revolusi Prancis menyebabkan banyak juga pencari suaka politik yang datang, selain para pencari kerja.

Sementara itu, keadaan para imigran yang tak terdidik, tak punya keahlian, menyulitkan keadaan. Kaum politisi konservatif banyak yang menentang kebijakan pemerintah dalam "pintu terbuka" ini.

Dengan posisi Prancis yang berada pada jalan silang Eropa, mudah untuk didatangi dan menjadi tempat menetap, baik untuk sementara, maupun seterusnya. Dan sebagaimana juga negeri-negeri lainnya, sejak awal Prancis sudah merupakan negara yang mempunyai akar dari dua sumber yang berbeda: orang Frank dan Gallo-romain. Ketika para imigran pertama berdatangan, dengan mudah dilakukan kebijakan asimilasi, karena para pendatang ini adalah orang Eropa juga (Italia, Spanyol, dan Portugis), jadi kebudayaan mereka tidak begitu berbeda, paling tidak, agama mereka sama, juga landasan budaya mereka masih budaya Yunani-Romawi. Namun, ketika gelombang imigran dari bekas jajahan datang, keadaan menjadi lebih sulit, karena mereka menyandang budaya yang jauh berbeda. Asimilasi tidak mungkin dilakukan. Usaha untuk menjalankan integrasi juga kurang berhasil. Akhirnya Prancis menganut pluralisme budaya saja, yang memberikan ruang gerak cukup leluasa baik bagi para pendatang, maupun bagi "tuan rumah". Dalam kebijakan ini,

para pendatang dapat dengan bebas melaksanakan tradisi budayanya, hanya sebatas tempat tinggalnya, sedangkan bila mereka ke luar, misalnya bersekolah di sekolah Prancis, mereka harus memakai budaya Prancis, yaitu bahasa dan tradisi Prancis. Itulah sebabnya maka sekarang di Paris dapat ditemukan banyak *ghetto* – masing-masing menurut tempat asal pendatang. Misalnya, komunitas Cina tinggal di *ghetto*-nya, demikian pula komunitas Arab, komunitas Afrika, dan seterusnya. Meskipun demikian, hal ini tidaklah mudah dijalankan. Sering terjadi friksi antara mereka dengan polisi Prancis.

Uni Eropa

Keadaan di Uni Eropa lain dengan keadaan di negara-negara anggotanya. Yang akan dibicarakan di sini bukanlah berbagai permasalahan kaum imigran dengan budayanya yang menimbulkan masalah multikulturalisme bagi negara-negara Eropa.

Tapi masalah yang timbul adalah: bagaimana masing-masing negara yang didatangi imigran, menyikapi keragaman budaya itu. Telah kita lihat hal itu di negeri Belanda, Inggris, dan Prancis. Kita tak dapat melakukan analisis yang sama terhadap Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara. Uni Eropa

belum mempunyai identitas yang jelas. Dalam bukunya "*Quelle identité pour l'Europe?*" Riva Kastoryano mempertanyakan, bisakah kita mencari jawaban tentang identitas Eropa itu dalam konsep multikulturalisme? Istilah multikulturalisme ini sering dikacaukan. Istilah ini dapat diartikan sebagai suatu situasi yang berasal dari keragaman budaya, dari pluralisme yang khas bagi semua masyarakat industri konsep multikulturalisme mengacu pada negara-bangsa (*Etat-nation*) yang, pada prinsipnya, cenderung pada penyatuan teritorial, bahasa dan budaya. Istilah tersebut dianggap sebagai jawaban untuk mengatur keragaman budaya (hal. 21-23).

Jika kita melayangkan pandangan retrospektif pada tahap-tahap utama konstruksi Uni Eropa, tampak adanya pembentukan sebuah instrumen yang kuat, sebuah kerangka institusional yang konsisten, serta pelaksanaan sejumlah kebijakan bersama. Rencana Schuman, Masyarakat Baja dan Batu Bara, Traktat Roma dan Maastricht, Pemilihan Umum Parlemen Eropa, kreasi pasar bersama Eropa, kelahiran dan pemberlakuan mata uang bersama, merupakan pilar-pilar kekuatan Eropa yang telah membuat perubahan mendalam pada geopolitik Eropa.

Saat ini, Uni Eropa beranggotakan 27 negara, sehingga tidak mudah

merumuskan lahirnya sebuah entitas budaya yang baru yang secara politis bersifat homogen. Pada kenyataannya, kekhasan pada tataran lokal dan nasional hadir lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Intensifikasi berbagai kebijakan pertukaran tidak mampu menghapuskan kontras dari aneka warna masing-masing negara anggota.

Bagi para antropolog, '*communauté*' atau masyarakat adalah segenap kemanusiaan yang anggota-anggotanya dipersatukan oleh ikatan budaya dan politik yang kuat. Definisi antropologis ini dapat dijadikan landasan mempertanyakan esensi dasar keberadaan '*communauté européenne*' (masyarakat Eropa). Sejak awal, bahkan Jean Monnet dengan tegas telah menggarisbawahi intentsitas keterikatan yang diharapkan dari pemerintah negara-negara Eropa untuk mewujudkan masyarakat Eropa yang bersatu. Pada konferensi keenam negara Eropa untuk mengesahkan rencana Schuman, dalam pidatonya, penggagas Eropa bersatu ini mengingatkan para peserta konferensi bahwa mereka hadir untuk melaksanakan sebuah karya bersama, tidak untuk membuat negosiasi kepentingan, akan tetapi untuk mencari peluang kepentingan bersama dalam kepentingan bersama pula. Pidato Monnet menekankan perlunya

konversi nyata dari keinginan nasional menjadi keinginan bersama yang menyeluruh. Monnet terus-menerus mengingatkan bahwa satu-satunya cara menemukan solusi hanyalah dengan mengeliminasi perasaan partikularistis. Signifikansi pidato Monnet memperlihatkan ketidakmaksudmawian kata 'negosiasi' dalam pembentukan Uni Eropa, kata yang biasanya menjadi landasan kerja sama antarnegara. Dalam pikiran para penggagas, Eropa bersatu harus menciptakan sebuah entitas politik yang baru, yang berbicara dengan satu suara, dan di mana tidak ada tempat bagi partikularisme dan egoisme nasional.

Bagi Marc Abélès, definisi antropologis kata '*communauté*' mengimplikasikan pula kesadaran identitas komunal bagi terbentuknya sebuah masyarakat bersama. Persoalannya bukan hanya terletak dalam kerangka politik dan institusional, tetapi menyinggung pula pluralisme budaya yang terkait erat dengan tradisi nasional. Dalam hal ini, sampailah kita pada dimensi yang lebih mendalam, dimensi kebudayaan, yang pada gilirannya memunculkan pertanyaan baru, *Benarkah sebuah identitas Eropa yang melebihi batas-batas nasional itu, bisa terbentuk?* Buah pikiran antropolog - antropolog Eropa menunjukkan bahwa sebuah komunitas, atau dalam

hal ini masyarakat, bukan hanya sekelompok orang yang anggota-anggotanya terikat dalam hubungan-hubungan produksi dan pertukaran dalam suatu wilayah bersama, yang juga fundamental adalah kenyataan berbicara dalam bahasa yang sama, bertukar nilai-nilai yang menentukan perilaku individu, serta berpartisipasi dalam semesta simbol dan ritual yang sama. Bagaimana keadaannya di Uni Eropa?

Eropa dapat dibedakan melalui 2 kategori: ruang dan waktu. Berdasarkan sudut pandang spasial, Eropa merupakan sebuah komunitas pada tataran tinggi, yang melingkupi multiplisitas populasi dan tradisi yang berbeda, sedangkan secara temporal, yang kita bicarakan adalah sebuah komunitas dalam proses konstruksi ke arah realisasi sebuah idealisasi. Kategorisasi ini berimplikasi pada masalah representasi di mana individu-individu dapat memasuki wilayah identitas bersama. Berbeda dengan model negara-bangsa yang telah ada, yang mengatur suatu wilayah geografis terbatas, Uni Eropa menjadi wilayah terbuka, tidak mudah menetapkan batas-batas wilayahnya secara definitif. Berawal dari 6 negara, kemudian bertambah menjadi 9 negara, 12 negara, sampai akhirnya sekarang ini menjadi 27 negara.

Perkembangan skala kewilayahan ini membawa konsekuensi pula pada hilangnya sifat kewilayahan terhadap praktik-praktik bersama dalam konstruksi Eropa. Nomadisme parlemen yang selalu berpindah tempat, merupakan gambaran sukarnya memiliki posisi awal, sebagai *tanda identitas*, bagi mereka yang mencari akar.

Berikut ini akan disampaikan tiga hal yang memperlihatkan tiadanya keutuhan budaya di Uni Eropa. Pertama-tama, yang muncul adalah masalah bahasa. Dalam sidang parlemen, peralihan dari satu bahasa ke bahasa lainnya menetralkan dinamika diskusi atau debat. Hal yang tidak terjadi ketika dua orang anggota parlemen dari negara yang sama berdiskusi. Komunitas bahasa yang sama memungkinkan pertukaran gagasan yang spontan, dengan kosa kata, acuan, dan wacana yang sama. Ketiadaan satuan bahasa telah menghilangkan sifat khas dari sebuah debat. Bahasa politik memiliki retorika yang khas di setiap bangsa dan negara. Adalah tugas yang sangat sulit, bahkan mustahil, bagi para penerjemah untuk membuat alih pesan yang akurat dari subtilitas satu bahasa ke bahasa lain. Demikianlah yang terjadi pada saat seorang anggota parlemen Yunani menyampaikan pidatonya. Juru bahasa yang bertugas

menjelaskan bahwa sang pembicara telah mengatakan suatu permainan kata namun tidak mungkin diterjemahkan, dan seraya bergurau, meminta semua peserta sidang untuk menunjukkan tata-krama yang semestinya di hadapan sebuah humor. Maka, ruang sidang pun segera dipenuhi dengan gelak tawa. Sebaliknya, dalam kasus sebuah humor yang dapat diterjemahkan dengan baik, reaksi yang diharapkan timbul dengan sendirinya, namun dengan sedikit keterlambatan, sehingga hilanglah reaksi spontan terhadap pembicara.

Masalah berikutnya yang akan dikemukakan di sini adalah masalah nilai yang kemudian mengatur perilaku. Pluralisme bahasa dan keragaman tradisi budaya dalam komisi Eropa dapat dikatakan mengakibatkan desorientasi para praktisi, khususnya dalam hal gaya administratif yang saling bertentangan. Pegawai negeri Prancis dengan mudahnya mengeritik karakter skema pegawai negeri Inggris; sebaliknya, yang dikritik itu akan mengemukakan ironi dari kerumitan dan aspek retorik catatan-catatan yang dibuat kolega Prancis mereka. Seorang penanggung jawab administratif Jerman tak henti-hentinya mengoreksi catatan yang dibuat oleh administrator Spanyol, atas nama ketaatan pada kaidah. Lebih

jauh lagi, akan muncul permasalahan stereotipe, yang mempertentangkan orang Utara dan mereka yang berasal dari wilayah geografis meridian; peminum bir dan peminum anggur, dingin dan hangat, taat dan bebas menyikapi kaidah orang-orang Yunani yang tidak beraturan, dan lain sebagainya. Seperti diketahui, interpretasi berdasarkan stereotype menyederhanakan realitas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kontak lintas budaya dalam lingkungan komisi Eropa menguatkan perbatasan regional, alih-alih menuju pembentukan identitas bersama.

Setelah bahasa dan perilaku, masalah ketiga yang akan dibicarakan adalah tentang simbol dan ritual. Sejauh ini, simbol-simbol yang ada pada Uni Eropa adalah bendera, hymne, atau lagu 'kebangsaan', dan beberapa tanda material (paspor, perangko, rambu-rambu di perbatasan). Pada tahun 1950, muncul pertama kali keinginan untuk menciptakan sebuah bendera Eropa.

Dua tahun kemudian, gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk sebuah bendera berlatarkan warna biru dengan lima belas (15) bintang emas, yang melambangkan keempat belas (14) negara anggota komisi Eropa dan seorang anggota tambahan. Ketidaksetujuan Jerman Federal membatalkan pengesahan

rancangan bendera Eropa itu.

Pada bulan Desember 1956, Dewan Eropa memilih bendera Eropa dengan dua belas (12) bintang emas, dan baru disahkan bertahun-tahun kemudian (1986) oleh Uni Eropa. Jumlah bintang emas tidak melambungkan jumlah anggota negara Uni Eropa, tetapi dipilih semata-mata berdasarkan pertimbangan estetis. Sementara itu, hymne Uni Eropa, *Song of Joy* karya Beethoven, ditentukan tanpa melewati banyak pertimbangan. Ketiadaan teks dalam lagu pemersatu bangsa Eropa memiliki makna tertentu. Sedikit menyerupai ruang kosong di tengah lingkaran kedua belas bintang pada bendera Uni Eropa, tidak hadirnya pesan verbal pada hymne tersebut dapat dianggap sebagai defisit simbolis yang mengilustrasikan Eropa. Peringatan ulang tahun Uni Eropa, dengan serangkaian pidato singkat, tampaknya juga tidak menunjukkan ritual yang biasanya mewarnai sekaligus memaknai hari kelahiran suatu bangsa.

Banyak hal yang menunjukkan belum adanya landasan kesatuan budaya yang kokoh di Uni Eropa. Di tiga negara anggota Uni Eropa yang telah dikemukakan di atas (Belanda, Inggris, dan Prancis), multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang kadang dianggap dapat meng-

atasi permasalahan kultural, kadang tidak. Sementara itu, di Uni Eropa, multikulturalisme baru merupakan fakta yang perlu dihadapi dalam mencari identitasnya. □

KEPUSTAKAAN

- Abèles, Marc. 1996. *En attente d'Europe*. Paris: Hachette.
- Amselle, 2001. *Vers un multiculturalisme français*. Paris: Champs, Flammarion.
- Doytcheva, Milena, 2005. *Le multiculturalisme*. Paris: La Découverte.
- Kastoryano, Riva. 2005. *Quelle Identité pour l'Europe?* Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- Kelly, Paul. 2002. *Introduction Between Culture and Equality* dalam (ed.) Paul Kelly, *Multiculturalism Reconsidered*, Cambridge: Polity Press.
- Liliweri, Alo. Prof. Dr. 2005 *Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta, LKIS.
- Parekh, Bhikhu 2000. *Rethinking Multiculturalism*, Harvard University Press Massachusetts : Cambridge
- Sartori, Giovanni, 1993. *Pluralisme, Multiculturalisme et Etrangers*. Paris : Editions des syrtés.
- Schor, Ralph. 1996. *Histoire de l'immigration en France*. Paris : Armand Colin.
- Wiarda, Howard J. 2001. *European Politics and the Age of Globalization*. Florida: Harcourt College Publishers.

•• PERPUSTAKAAN ••
UNIVERSITAS INDONESIA